



**PEMERINTAH KOTA
DENPASAR**



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 – 2015



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA DENPASAR
(REVISI 2014)**



DENPASAR TO GOOD GOVERNANCE

www.denpasarkota.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Wara Nugrahanya, maka kami telah berhasil menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar tahun 2011 - 2015. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengembangkan dan melanjutkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar dalam bidang pelaksanaan Pos dan Komunikasi. Dari penuangan spectrum pemikiran, terbingkai dalam mekanisme perencanaan, mengintegrasikan, mensinkronkan, serta simplifikasi dari isu-isu nasional dan daerah, dengan tujuan menciptakan akselerasi pembangunan guna mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar tahun 2011- 2015 merupakan kewajiban yang harus dibuat dan dilaksanakan untuk lima tahun ke depan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2011 – 2015.

Kami berterima kasih kepada semua bidang/sekretariat dan seksi/sub bag yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar serta pihak terkait yang telah memberikan sumbang saran yang konstruktif, sehingga kami berhasil menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar tahun 2011- 2015, dengan harapan kebijakan dan program pembangunan yang terkandung di dalamnya dapat merepresentasikan kebutuhan masyarakat, serta mampu membangun opini public dan menciptakan partisipasi yang tinggi dari masyarakat untuk merealisasikannya.

Mudah-mudahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar tahun 2011 - 2015 ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar pada tahun-tahun berikutnya.

Denpasar, Juli 2014

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar

I Dewa Made Agung, SE, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19660525 199303 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGATAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	12
2.1 Struktur Organisasi SKPD	18
2.2 Sumber Daya SKPD.....	21
2.3 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	22
2.4 Kondisi Umum Masa Kini	39
2.5 Permasalahan	41
2.6 Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan	42
BAB III ISU STRATEGIS	52
3.1 Isu Strategis	52
3.2 Analisis Internal dan Eksternal	53
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
61	
4.1 VISI SKPD	61
4.2 MISI SKPD.....	61
4.3 TUJUAN SKPD	62
4.4 SASARAN SKPD	62
4.5 STRATEGI SKPD	62
4.6 ARAH KEBIJAKAN	62

BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	63
5.1	Rencana Program.....	63
5.2	Kegiatan.....	64
5.3	Indikator Kinerja	71
5.4	Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan Pagu Indikatif	74
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	77
6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	78
6.2	Target IKU Selama Lima Tahun	80
6.3	Matrik Renstra.....	81
BAB VII	PENUTUP	83

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pengawasan pelaksanaan program kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan rencana yang telah diprogramkan, perlu dukungan yang melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang indikasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemberi amanah dapat terpantau sehingga prinsip-prinsip pemerintahan (*Good Governance*) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui tiga pilar utamanya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas berjalan dengan baik. Untuk mengukur kinerja instansi pemerintah melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya pertanggungjawaban instansi Pemerintah baik di pusat dan daerah agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun suatu perencanaan stratejik untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan stratejik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan stratejik instansi

pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan stratejik, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Komunikasi dan informasi serta Pos dan Telematika, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global. Rencana strategis yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Begitu juga kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong Masyarakat Denpasar menuju masyarakat informasi.

Pengembangan sistem manajemen organisasi jaringan sebagai suatu upaya untuk dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. Organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (public-private partnership), memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu ketika masyarakat mendambakan terwujudnya reformasi sektor publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-Government.

Melalui proses tersebut, pemerintah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah. Masyarakat, sektor swasta dan pemerintah mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (telematika) di Indonesia menjadi lebih terarah dan terintegrasi serta tidak tumpang tindih pengembangannya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Oleh karenanya pemerintah menyusun pula konsep sistem informasi nasional sebagai acuan/panduan bagi penyusunan national e-Strategy di Indonesia yang dilengkapi dengan konsep pelaksanaan secara makro melalui program e-Indonesia, yang didalamnya termasuk pembangunan e-Government

Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (e-Government Development Framework) melalui INPRES No. 3 Tahun 2003 yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan detail teknis di bidang e-Government. Agar kebijakan pengembangan e-Government dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu, maka masih diperlukan peraturan, standarisasi dan panduan yang konsisten dan saling mendukung.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar akan meningkatkan pengembangan E-Government guna kelancaran

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik serta meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif dan efisien sebagaimana *VISI* Kota Denpasar yaitu Mewujudkan Denpasar Kreatif Berbasis Budaya Unggulan Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan, dengan *MISI* Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (wallfare siciety).

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar Tahun 2011 – 2015 dilandasi dengan beberapa ketentuan :

1. INPRES No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (e-Government Development Framework)
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3147)
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 851)
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
6. Perda No : 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perumusan Rencana Strategis dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang telah disusun, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, dimana suatu instansi pemerintah dituntut juga untuk melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan secara terus menerus. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Adapun manfaat Renstra yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana Perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
3. Perencanaan Strategik memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan).
4. Perencanaan Strategik yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas kegiatan atau pembangunan di bidang Komunikasi dan Informasi, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2010 - 2015 dapat tercapai.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan.
5. Memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan implementasi bagi pengembangan e-government Pemerintah Kota Denpasar yang komprehensif, efisien, efektif dan terpadu

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar adalah :

1. Merencanakan serta melakukan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola dan meningkatkan keberhasilan organisasi/ Dinas secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. (*Goals*)
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi tindakan masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima atau meningkatkan mutu layanan public melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kota Denpasar
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*)

1.3.1 HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

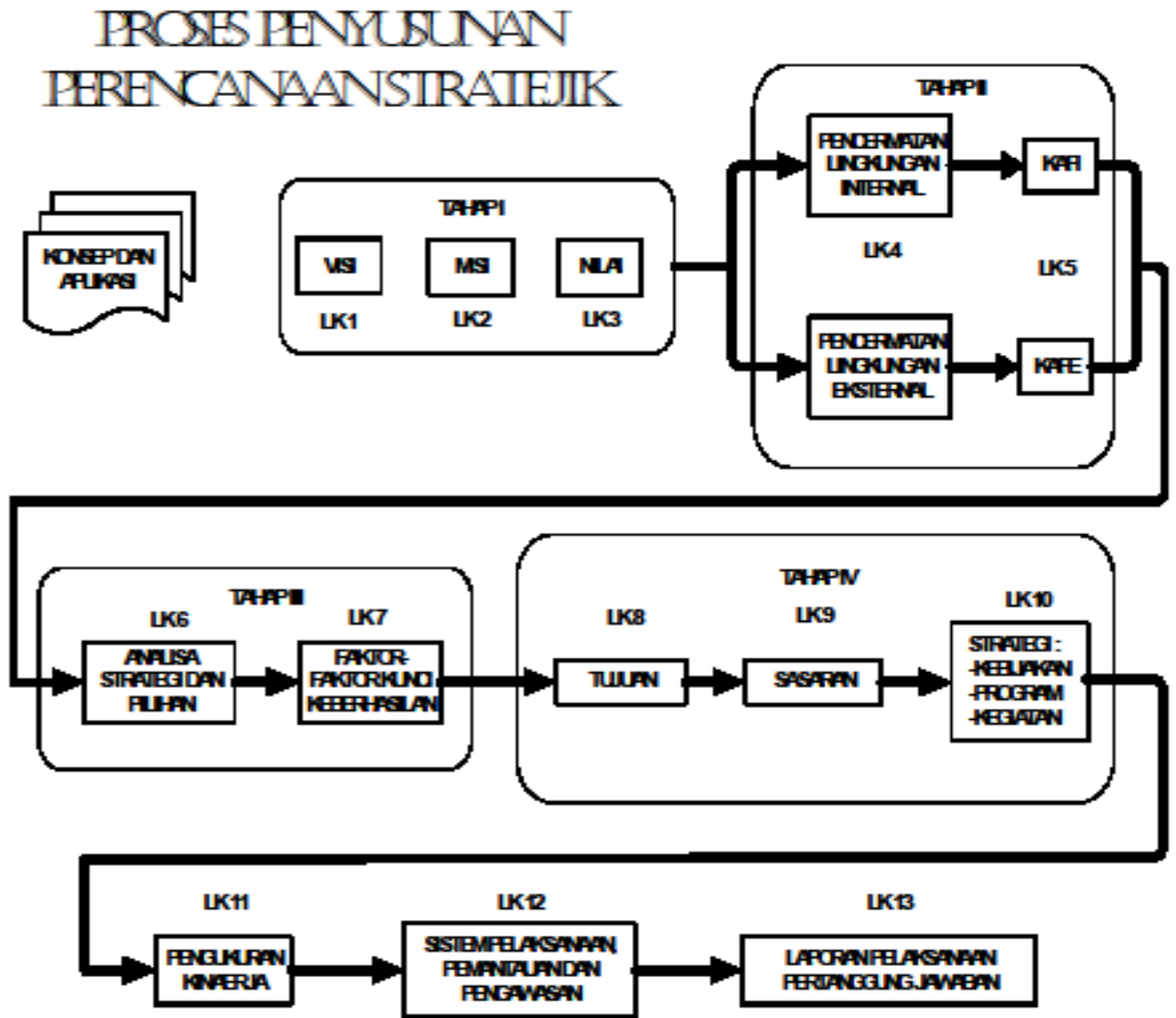
Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Denpasar Tahun 2010-2015 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar khususnya dalam menjalankan

agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kota Denpasar maupun RTRW Kota Denpasar, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Denpasar. Keberadaan RKPD Kota Denpasar tersebut selanjutnya dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Kendati terjadi beberapa perubahan, baik sistematika maupun nama di dalam dokumen perencanaan hingga terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, esensi utama tidak berubah yaitu dokumen perencanaan harus disusun secara partisipatif dalam rangka mengoptimalkan pelayanan masyarakat yang menuntut adanya efisiensi dan efektifitas termasuk di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar. Perbedaan mendasar sistematika dan hierarki dokumen perencanaan sebelum dan setelah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah adanya Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang menjadi pertimbangan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Artinya sebelum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dilahirkan, dinas hanya fokus pada perencanaan strategis (Renstra) untuk periode 5 tahun sementara sekarang dokumen tersebut harus diterjemahkan setiap tahun dalam bentuk Renja SKPD. Sedangkan kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJM Daerah Kota Denpasar kedalam RKPD Kota Denpasar untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Denpasar. Dengan demikian maka RAPBD yang dibuat berdasarkan RKPD mengacu pada Renja SKPD. Satu hal yang menarik adalah kedua dokumen daerah tersebut harus mengacu pada RKP Nasional (Rencana Kerja Pemerintah). Dengan demikian dari sisi hukum dapat dikatakan bahwa RAPBD mengacu dan terhubung dengan RAPBN. Gambaran tentang hubungan antara RPJM Daerah Kota Denpasar Tahun 2010-2015 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini :

Di bawah ini gambaran tentang proses penyusunan Rencana Strategis.

Gambar 2

Proses Penyusunan Perencanaan Strategik



1.4 . SISTEMATIKA

Pada dasarnya Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan / kendala yang ada untuk masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan RENSTRA SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya dan Sistematika RENSTRA.

BAB II – Gambaran Pelayanan SKPD, menjelaskan Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar, Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar, Kondisi Masa Kini, Permasalahan, Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar.

BAB III – Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Kinerja Pelayanan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan, Telahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telahan Renstra, Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Penentuan isu - isu Strategis.

BAB IV – Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan, menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Lima Tahun kedepan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar serta Strategis dan Kebijakan .

BAB V – Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar.

BAB VI – Indikator Kinerja SKPD pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, menjelaskan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD .

BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar Tahun 2011 - 2015.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Kota Denpasar. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam bidang komunikasi dan informatika. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut dinas daerah juga mempunyai fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya yaitu dalam bidang komunikasi dan informatika, serta memberikan pelayanan dalam proses pemberian rekomendasi Tower, Spesifikasi Komputer dan rekomendasi Aplikasi di Kota Denpasar, pelaksanaan pelayanan umum berupa Pengaduan Rakyat On Line di Kota Denpasar, Informasi Keliling, RPKD (Radio Publik Kota Denpasar 92.6 FM), Pengelolaan Website Kota Denpasar, Pengelolaan Jaringan dan Sound System di Kota Denpasar, serta pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya dalam hal ini bidang komunikasi dan informasi.

Menara Telekomunikasi di Kota Denpasar



Jenis Aplikasi TI di Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2014

1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
2. Akta Online
3. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Konsolidasi
5. KTP Elektronik
6. Arsip Digital
7. Data Statistik Pertanian Kota Denpasar
8. Sistem Informasi Kearsipan (Smart Arsip)
9. Kebudayaan berbasis Geografis Information System (GIS)
10. Aplikasi Surat Keluar – Masuk
11. Sistem Informasi Kerjasama
12. Sistem Informasi Geografis Ruas Jalan Kota Denpasar
13. SMS Gateway
14. E-Pooling IKM
15. Sistem Pelayanan Perijinan Keliling
16. E-Office
17. LPPD On Line
18. Sistem Informasi PBB
19. Sistem Informasi Pajak Daerah (SIMPADA)
20. Sistem Informasi SSPD BPHTB
21. SIMPEG
22. e-Monev (TEPPA)
23. SIG Lokasi Rawan Kecelakaan
24. SIG Sistem Informasi Perhubungan
25. Sistem PKB Online
26. Live Streaming ATCS
27. PPDB Real Time Online (RTO)
28. Pendataan PAUDNI
29. Dapodik
30. Pengaduan Rakyat Online Kota Denpasar (PRODENPASAR)

31. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)
32. Bank Data
33. Jendela Kota Denpasar (Pusat Data berbasis GIS)
34. Pengembangan Website Portal
35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIPKD)
36. SPPA (Sistem Perencanaan Pemaketan Anggaran)
37. SSPK (Sistem Surat Perjanjian Kerja)
38. SME (Sistem Monotoring dan Evaluasi)
39. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)



PRO Denpasar



Beberapa media pengaduan yang terintegrasi dengan PRODENPASAR

MEDIA PENGADUAN

Sarana pengaduan yang terintegrasi dengan PRODENPASAR

Kotak Pengaduan

Telepon 0361 419444

Facebook

<https://www.facebook.com/kotadenpasar>
Fans pages: denpasarkota

Twitter @prodenpasar

Email pengaduan@denpasarkota.go.id
prodenpasar@gmail.com

Mobile Apps PRO DENPASAR

Radio 92.6 RPKD FM/ 0361 244444

Website PRODENPASAR: pengaduan.denpasarkota.go.id



PRO DENPASAR

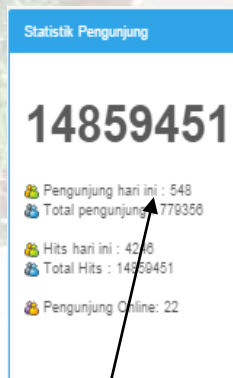
- Menjembatani Partisipasi Publik
- Integrasi pengaduan yang bersumber dari berbagai media

Radio Publik Kota Denpasar 92.6 FM



Radio Publik Kota Denpasar melalui gelombang 92.6 FM memberikan layanan informasi menyangkut lalulintas kota Denpasar dan sekitarnya, selain itu Radio Publik Kota Denpasar menjadi sarana media kontrol masyarakat melalui program Halo Denpasar.

Website Kota Denpasar www.denpasarkota.go.id & Subdomain

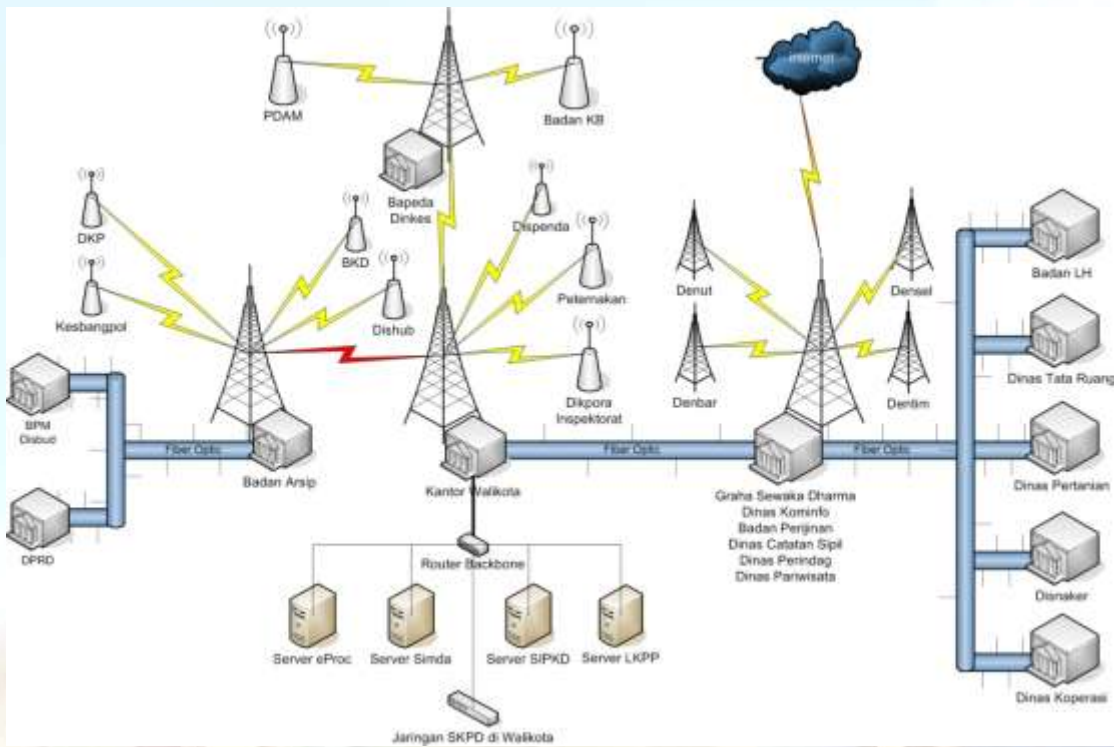


Rata-rata
Kunjungan /
hari = 4246



62 Subdomain
Kota Denpasar

Pengelolaan Jaringan Internet Kota Denpasar



Pelayanan Informasi Mobile



Menginformasikan peraturan-peraturan pemkot Denpasar

Contoh :

Untuk tidak membuang atau menaruh sampah sembarangan, menghimbau masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan serta memberikan informasi perijinan yang berlaku di pemkot Denpasar.

Mobile Community Acces Point (MCAP)



Dinas Kominfo Kota Denpasar melalui Mobile Coommunity Acces Point menyediakan layanan internet gratis bagi masyarakat.

Jadwal M-CAP

- Sabtu, di depan Rumah Pintar Pukul 10.00 Wita
- Minggu di depan Pura Jagatnata Pukul 16.00 Wita

Mobil Sound Keliling



Untuk membantu kegiatan pemerintah kota denpasar, diskominfo menyediakan fasilitas peralatan sound system yang siap setiap saat apabila diperlukan dengan mobil sound system.



2.1. STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Bina Program yang terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan
 2. Seksi Data dan Informasi
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
4. Kepala Bidang Piranti Lunak yang terdiri dari ;
 1. Seksi Analisa dan Perancangan Piranti Lunak.
 2. Seksi Pengembangan dan Implementasi Piranti Lunak;
 3. Seksi Sosialisasi, Pelatihan dan Pemeliharaan Piranti Lunak.
5. Kepala Bidang Piranti Keras dan Jaringan yang terdiri dari ;
 1. Seksi Anaalisa dan Perencanaan Piranti Keras dan Jaringan;
 2. Seksi Pelaksanaan Piranti Keras dan Jaringan ;
 3. Seksi Sosialisasi dan Pemeliharaan Piranti Keras dan Jaringan.
6. Kepala Bidang Pos dan telematika terdiri dari :
 1. Seksi Pos dan Komunikasi;
 2. Seksi Publikasi Media dan Telematika;
 3. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Penyiaran Publik Lokal
 2. Kasub Bag. Tata Usaha
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Publik
 2. Kasub Bag. Tata Usaha

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Denpasar. Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang serta 2 (dua) Kepala UPTD. Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, sedangkan Kepala Bidang dibantu oleh masing – masing 3 (tiga) orang Kepala Seksi.

Gambar 3

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar



KEPALA DINAS
I Dewa Made Agung, SE, M.Si

SEKRETARIS
I Ketut Sumerta, SE

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
[] [] []

KASUBAG UMUM
A.A.Sagung Yuli Surpanawati, SE

KASUBAG KEPEGAWAIAN
Made Suryaningih, Bsc, SH

KASUBAG KEUANGAN
Ni Wayan Martini, SE

KABID BINA PROGRAM
Ni Alit Sucitawati, SE

KABID PIRANTI LUNAK
Anom Prasetya, SE

KABID PIRANTI KERAS & JARINGAN
I Nym Darmayasa, S.Sos, M.Si

KABID POS & TELEMATIKA
IB Gde Suttha Wijaya, SE, MM

KASI PERENCANAAN
I.A. Kamang Marini, SH, M.Si

KASI ANALISA & PERENCANAAN PIRANTI LUNAK
Jayendra Arsa Putra AM, SE

KASI SOSIALISASI & PEMELIHARAAN PKJ
I Gst. A.Pt. Maniknaya, S.Sos

KASI PUBLIKASI MEDIA & TELEMATIKA
Dra Lala Tendriwati

KASI DATA DAN INFORMASI
Ni Ma Anggreni Widhiyani, S.Sos

KASI PENGEMBANGAN & IMPLEMENTASI PIRANTI LUNAK
A.A.Sagung Ratih Juliani, ST

KASI PENGEMBANGAN & IMPLEMENTASI PKJ
I B Dwi Putra Amayasa, ST

KASI POS & KOMUNIKASI
I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih, SH

KASI EVALUASI DAN PELAPORAN
Ni Nym Ranith Artini, S.Ip

KASI SOSIALISASI, PELATIHAN & PEMELIHARAAN PIRANTI LUNAK
Sri Ayu Sutrisna, S.Kom, MT

KASI ANALISA & PERENCANAAN PKJ
Putu Aju Wiwiek Sutari, S.Sos

KASI PENGAWASAN & PENYULUHAN
I Gst Pt Kampyang Widagda, SE

KA. UPT. PENYIARAN PUBLIK LOKAL
Cokorda Istri Sri Kristinadewi, SS

KA. UPT. PUSAT INFORMASI PUBLIK
Gde Wirakusuma Wahyudi, S.Sos

KASUBAG TU
Tjokorda Istri Agung Diah Kencanawati, SE

KASUBAG TU
Ni Luh Putu Suyeni, SE

2.2. SUMBER DAYA SKPD

Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Tahun 2014

- Data Pegawai berdasarkan golongan.

Tabel. 1

DATA PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DENPASAR BERDASARKAN GOLONGAN

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Golongan IV	9	
2	Golongan III	30	
3	Golongan II	6	
4	Golongan I	-	
5	Fungsional	-	
6	Tenaga Kontrak (Kominfo)	23	
	Tenaga Kontrak (UPT) PIP	61	
	Tenaga Kontrak (UPT) Radio	15	
	Jumlah	144	

- Data Pegawai berdasarkan pendidikan.

Tabel. 2

DATA PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DENPASAR BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	PASCA SARJANA – S2	7	
2	SARJANA – S1	31	
3	DIPLOMA III	-	
4	DIPLOMA II	-	
5	SLTA	6	
	Jumlah	44	

2.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam hal komunikasi dan informatika sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kota Denpasar. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut dinas daerah juga mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, dalam hal ini bidang komunikasi dan informatika, pemberian rekomendasi bidang teknologi informasi dan komunikasi serta pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya pada bidang komunikasi dan informatika.

Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar sesuai ***Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2013*** yaitu :

(1) KEPALA DINAS, mempunyai tugas :

- a. Menetapkan Program Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. Membuat perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika berdasarkan kewenangan yang ada;
- c. Memberikan pelayanan perijinan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- e. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- f. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- g. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) SEKRETARIS DINAS, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Sub Bagian;
- b. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Sub Bagian;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- f. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
- h. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;

SEKRETARIAT, terdiri dari : Sub Bag Umum, Sub Bag Kepegawaian, Sub Bag Keuangan.

1. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rencana kegiatan sub bagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan sub bagian sebagai penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- f. Melaksanakan urusan surat menyurat;

- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja sekretariat sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas;
- h. Menyusun rencana kegiatan sekretariat berdasarkan rencana kegiatan dari masing-masing sub bagian;
- i. Melaksanakan pengetikan surat menyurat dan penggandaan naskah dinas;
- j. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- k. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol;
- l. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;

2. Sub Bagian Kepegawaian

- a. Menyiapkan rencana kegiatan sub bagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan sub bagian sebagai penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- f. Menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Menyiapkan data kepegawaian;
- h. Membuat laporan kepegawaian;
- i. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai;
- j. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- k. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;

3. Sub Bagian Keuangan

- a. Menyiapkan rencana kegiatan sub bagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan sub bagian sebagai penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
 - c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan;
 - d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - f. Menyusun rencana anggaran biaya;
 - g. Menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;
 - h. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
 - j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(3) KEPALA BIDANG BINA PROGRAM, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan rencana kegiatan sekretariat;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Dinas berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Bidang dan sekretariat;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- f. Menyusun perencanaan Umum Dinas;
- g. Mengelola data dan informasi Dinas;

- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan Sekretariat;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;

Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BIDANG BINA PROGRAM terdiri dari : **Seksi Perencanaan, Seksi Data dan Informasi dan Seksi Evaluasi dan Pelaporan.**

1. Seksi Perencanaan

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Bina Program;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Bina Program;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- f. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan pedoman petunjuk teknis di bidang Komunikasi dan informatika;
- g. Menyusun program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat;
- h. Menyusun perencanaan umum tahunan dan lima tahunan Dinas berdasarkan perencanaan Bidang dan Sekretariat;
- i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;

2. Seksi Data dan Informasi

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Bina Program;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Bina Program;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- f. Mengelola domain denpasarkota.go.id dan sub domain Dinas komunikasi dan Informatika;
- g. Mengkoordinasikan dengan SKPD lain terkait informasi yang akan ditampilkan di domain denpasarkota.go.id;
- h. Menyusun data dan informasi dari SKPD lainnya;
- i. Melaksanakan penghimpunan, penelitian dan analisis data-data dari masing-masing bidang;
- j. Menyusun bahan informasi yang berkaitan dengan kebijakan Dinas;
- k. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;

3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Bina Program;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Bina Program;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan dan pelaksanaan dinas;
- g. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan evaluasi program

- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kinerja dinas;
- i. Memantau dan mengevaluasi rencana program dan kegiatan, baik tahunan maupun lima tahunan yang telah ditetapkan;
- j. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Program.

(4) KEPALA BIDANG PIRANTI LUNAK, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan rencana kegiatan bidang berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Piranti Lunak.
- b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Piranti Lunak.
- c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- e. memeriksa hasil kerja bawahan.
- f. melaksanakan pengelolaan urusan analisa dan perancangan piranti lunak.
- g. melaksanakan pengelolaan urusan pengembangan dan implementasi piranti lunak
- h. melaksanakan pengelolaan urusan sosialisasi, pelatihan dan pemeliharaan piranti lunak.
- i. mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan.
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Piranti Lunak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

BIDANG PIRANTI LUNAK, terdiri dari : Seksi Analisa dan Perancangan Piranti Lunak, Seksi Pengembangan dan Implementasi Piranti Lunak, Seksi Sosialisasi, Pelatihan dan Pemeliharaan Piranti Lunak.

1. Seksi Analisa dan Perancangan Piranti Lunak.

- a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Piranti Lunak.
- b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Piranti Lunak.
- c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- e. memeriksa hasil kerja bawahan.
- f. melaksanakan survey perencanaan piranti lunak dan sistem informasi.
- g. melaksanakan analisis piranti lunak dan sistem informasi yang direncanakan.
- h. melaksanakan analisis disain piranti lunak dan sistem informasi.
- i. menetapkan bentuk piranti lunak dan system informasi.
- j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan.
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Pengembangan dan Implementasi Piranti Lunak;

- a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Piranti Lunak.
- b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Piranti Lunak.
- c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. Menetapkan tata cara pembuatan piranti lunak dan sistem informasi yang akan dibuat.
- e. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan
- f. memeriksa hasil kerja bawahan.
- g. melaksanakan pengembangan piranti lunak dan sistem informasi.
- h. melaksanakan implementasi piranti lunak dan sistem informasi.
- i. membuat dokumentasi piranti lunak dan sistem informasi untuk mempermudah perbaikan sistem.

- j. menetapkan standarisasi pembuatan piranti lunak dan sistem informasi
- k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan.
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Sosialisasi, Pelatihan dan Pemeliharaan Piranti Lunak.

- a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Piranti Lunak.
- b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Piranti Lunak.
- c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- e. memeriksa hasil kerja bawahan.
- f. melaksanakan sosialisasi piranti lunak dan sistem informasi.
- g. melaksanakan pelatihan SDM tentang piranti lunak dan sistem informasi.
- h. melaksanakan perawatan piranti lunak dan sistem informasi.
- i. melaksanakan perbaikan pada kerusakan piranti lunak dan sistem informasi.
- j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan.
- k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing Seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah Kepala Bidang Piranti Lunak.

(5) KEPALA BIDANG PIRANTI KERAS DAN JARINGAN, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Seksi di Bidang Piranti Keras dan jaringan.
- b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Piranti Keras dan Jaringan.
- c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidang masing-masing.

- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- e. memeriksa hasil kerja bawahan.
- f. melaksanakan pengelolaan urusan analisa perancangan piranti keras dan jaringan.
- g. melaksanakan pengelolaan urusan pelaksana piranti keras dan jaringan.
- h. melaksanakan pengelolaan urusan sosialisasi pemeliharaan piranti keras dan jaringan.
- i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan.
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Piranti Keras dan Jaringan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BIDANG PIRANTI KERAS DAN JARINGAN terdiri dari : **Seksi Analisa dan Perencanaan Piranti Keras dan Jaringan, Seksi Pelaksanaan Piranti Keras dan Jaringan, Seksi Sosialisasi dan Pemeliharaan Piranti Keras dan Jaringan.**

1. Seksi Analisa dan Perencanaan Piranti Keras dan Jaringan;

- a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Piranti Keras dan Jaringan.
- b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Piranti Keras dan Jaringan.
- c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawaha
- e. memeriksa hasil kerja bawahan.
- f. melaksanakan survey kebutuhan piranti keras dan jaringan.
- g. melaksanakan analisa kebutuhan piranti keras dan jaringan.
- h. melaksanakan analisa rancangan pengadaan piranti keras dan jaringan.
- i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan.

- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Pelaksanaan Piranti Keras dan Jaringan ;

- a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Piranti Keras dan Jaringan.
- b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Piranti Keras dan Jaringan.
- c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- e. memeriksa hasil kerja bawahan.
- f. Memberikan spesifikasi piranti keras dan jaringan.
- g. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan piranti keras dan jaringan.
- h. melaksanakan evaluasi pengadaan dan pembuatan piranti keras dan jaringan.
- i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan.
- j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Sosialisasi dan Pemeliharaan Piranti Keras dan Jaringan.

- a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Piranti Keras dan Jaringan.
- b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Piranti Keras dan Jaringan.
- c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- e. memeriksa hasil kerja bawahan.
- f. melaksanakan sosialisasi pengadaan piranti keras dan jaringan.
- g. melaksanakan pelatihan SDM pemakaian dan perawatan piranti keras dan jaringan.
- h. melaksanakan pemeriksaan dan perbaikan piranti keras dan jaringan.
- i. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan.

- j. melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Piranti Keras dan Jaringan.

(6) KEPALA BIDANG POS DAN TELEMATIKA, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Pos dan Telematika.
- b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Pos dan Telematika.
- c. mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan. memeriksa hasil kerja bawahan.
- e. memberikan rekomendasi pengurusan ijin jasa titipan lokal, cabang, agen dan intra kota.
- f. melaksanakan pengawasan ijin untuk penyelenggaraan instalasi kabel rumah/gedung.
- g. melaksanakan pengawasan pengujian alat perangkat pos dan telekomunikasi.
- h. memantau pelanggaran ijin atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat pos dan telekomunikasi.
- i. memantau dan membina pengguna ijin spektrum frekuensi radio dan orbit satelit untuk televisi lokal dan radio lokal mengacu pada alokasi spektrum frekuensi nasional.
- j. melaksanakan pembinaan dan evaluasi kegiatan filateli.
- k. memberikan usulan rencana perumusan standar postel.
- l. melakukan inventarisasi dan pemantauan kegiatan jasa pelayanan telekomunikasi dan pelanggan telepon seluler.
- m. melakukan pengawasan pelaksanaan tarif jasa telepon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. menyusun program pembinaan usaha jasa titipan.
- o. melakukan inventarisasi dan analisis serta evaluasi kinerja usaha titipan.
- p. melaksanakan publikasi dan komunikasi melalui media.
- q. melaksanakan pengawasan terhadap media.

- r. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan.
- s. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

BIDANG POS DAN TELEMATIKA, terdiri dari : Seksi Pos dan Komunikasi, Seksi Publikasi Media dan Telematika, Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.

1. Seksi Pos dan Komunikasi;

- a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pos dan telematika.
- b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pos dan Telematika.
- c. mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- e. memeriksa hasil kerja bawahan.
- f. melaksanakan pembinaan filateli di sekolah dan pengembar filateli.
- g. melaksanakan pengujian, penertiban alat perangkat dan penandaan alat pos dan telekomunikasi.
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa titipan lokal, cabang, agen dan intra kota.
- i. melakukan pembinaan dan penertiban standatr postel dan jasa telepon seluler.
- j. melaksanakan pemantauan dan penggunaan ijin spektrum frekuensi dan orbit satelit untuk teletivisi dan radio lokal.
- k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan.
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Publikasi Media dan Telematika;

- a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pos dan Telematika.
- b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pos dan Telematika.

- c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- e. memeriksa hasil kerja bawahan.
- f. melaksanakan publikasi media luar ruangan dan media masa.
- g. melaksanakan publikasi melalui jaringan komputer dan internet.
- h. melaksanakan pemeliharaan situs website.
- i. melaksanakan pengawasan dan pembinaan sub domain portal.
- j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan.
- k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.

- a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pos dan Telematika.
- b. menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pos dan Telematika.
- c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- e. memeriksa hasil kerja bawahan.
- f. melaksanakan pengawasan izin peredaran CD, VCD.
- g. melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada media publikasi.
- h. melaksanakan media tatap muka melalui ceramah dan diskusi.
- i. melaksanakan pameran dan promosi.
- j. melaksanakan informasi keliling.
- k. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan.
- l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pos dan telematika.

**(7) KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYIARAN PUBLIK LOKAL,
mempunyai tugas :**

- a. Menetapkan program Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyiaran Publik Lokal;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan UPTD sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan informatika;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasi tugas - tugas bawahan;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahannya;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- f. Melaksanakan kegiatan operasional penyiaran publik Kota Denpasar;
- g. Melaksanakan pengawasan dan mengkoordinasikan operasional siaran;
- h. Menyeleksi dan menginterview calon penyiar dan mengawasi training penyiaran;
- i. Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan program siaran;
- j. Memberikan bimbingan kepada penyiar dan operator menyangkut format, visi dan misi;
- k. Mengawasi dan bertanggungjawab seluruh program kegiatan radio dari pemberitaan, musik dan informasi yang tersiar;
- l. Merencanakan dan menyusun format siaran dan kegiatan oof ait;
- m. Monitoring dan evaluasi secara keseluruhan hasil kegiatan pelaksanaan tugas operasional Unit Pelaksana Teknis Penyiaran Publik Lokal;
- n. Membuat laporan pertanggungjawaban kinerja Unit Pelaksana Teknis Penyiaran Publik Lokal;
- o. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- p. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Menghimpun bahan dan mengkoordinasikan penyusunan Program Kerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Unit Pelaksana Teknis Penyiaran Publik Lokal
- b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas - tugas bawahannya;

- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Melaksanakan urusan Ketatausahaan;
- f. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
- g. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. Melaksanakan urusan keuangan;
- i. Membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan;
- j. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(8) KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT INFORMASI PUBLIK, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program kerja unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Menyusun laporan hasil kegiatan UPTD sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas - tugas bawahan;
- d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- f. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengaduan masyarakat, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Gedung Graha Sewaka Dharma Pusat Pelayanan Publik Pemerintah Kota Denpasar;
- g. Menyusun rencana kebutuhan Tenaga Pengamanan, Tukang Kebun, Cleaning Service, Pramutamu, Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Arsip, Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Petugas Pelaksana Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Tenaga Kepemangkuan;
- h. Melaksanakan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik sesuai dengan pedoman dan kewenangan yang telah ditetapkan;

- i. Melaksanakan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik sesuai dengan pedoman dan kewenangan yang telah ditetapkan ;
- j. Menyiapkan dan mengusulkan Standar Operating Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal pada masing - masing layanan;
- k. Menyiapkan dan melaksanakan aci - aci rutin termasuk piodalan pada pelinggih Gedung Graha Sewaka Dharma Pusat Pelayanan Informasi Publik;
- l. Melaksanakan penataan dan pengaturan Ruang Tunggu, Kantin dan Kuliner, Ruang Rapat/Pertemuan serta Parkir Kendaraan dilingkungan Gedung Graha Sewaka Dharma Pusat Pelayanan Informasi Publik;
- m. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahannya;
- n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Menghimpun bahan dan mengkoordinasikan penyusunan Program Kerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Unit Pelaksana Teknis Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Melaksanakan urusan Ketatausahaan;
- f. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
- g. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. Melaksanakan urusan keuangan;
- i. Membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan;
- j. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.4. KONDISI UMUM MASA KINI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Denpasar yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pelaksanaan teknis bidang teknologi informasi dan komunikasi serta pos dan telekomunikasi Kota Denpasar. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan pelayanan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat memberikan dan meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Mengingat pesatnya kemajuan Tehnologi saat ini baik itu tekhnologi Komunikasi, media, dan Informatika (Telematika) serta meluasnya perkembangan infrastruktur Informasi Global hal tersebut berpengaruh terhadap masyarakat dan telah merubah pola / cara berpikir masyarakat. Berbagai keadaan menunjukkan bahwa kita belum mampu mendayagunakan potensi Tehnologi Telematika secara baik, oleh karena itu kita terancam digital divide yang semakin tertinggal dibanding negara-negara maju. Kesenjangan sarana dan prasarana Telematika antara kota dan pedesaan juga memperlebar jurang perbedaan sehingga mengundang digital divide dalam sistem informasi Komunikasi yang sedang kita kembangkan.

Melihat kenyataan ini kita perlu melakukan terobosan baru atau diperlukan adanya perencanaan strategik atau perencanaan yang konprehensif terarah dan terpadu guna dapat secara efektif mempercepat pendayagunaan teknologi Telematika yang pada era ini mempunyai peluang/potensi yang sangat besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan menghindari disintegrasi bangsa serta sebagai landasan yang kokoh bagi pembangunan secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui kondisi saat ini tentang kesiapan Masyarakat, Pihak Swasta dan Pemerintah Kota Denpasar dalam penerapan e-Government dilakukan survey dan pengamatan langsung serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan e-government di Kota Denpasar. Hasil analisis terhadap pelaksanaan pengembangan tersebut adalah :

1. Perilaku dan Kesiapan Pengguna (Masyarakat dan Perusahaan)

- a. Masyarakat Kota Denpasar telah terbiasa menggunakan Komputer (83.6%) dan

secara rutin menggunakannya (63.6%), hanya saja lama penggunaannya masih relatif singkat (kurang dari 5 jam per minggu) dengan tempat pemakaian PC yang beragam, yaitu di rumah, kantor, sekolah, rental. Pemakaian Komputer oleh responden sudah cukup lama, yaitu sebanyak lebih dari 70% telah menggunakannya lebih dari setahun. Responden yang memiliki Komputer di rumah, cukup banyak yaitu 45%.

- b. Untuk internet, sebagian besar responden masyarakat telah mengetahui dan menggunakannya (52%). 58% dari pengguna internet menggunakan warnet untuk akses. Fasilitas yang digunakan masih dominan untuk e-mail (83%) dan chatting (65%). Akses e-mail sudah ada yang menggunakan PDA (18%).
- c. Perusahaan yang menggunakan dukungan komputer untuk operasional cukup dominan (78.6%) dimana 70% telah terhubung dengan jaringan lokal (LAN) dan internet

2. Kesiapan Unit dan SDM

- a. 54% perusahaan telah memiliki divisi/bagian EDP atau Pusat Komputer di mana jumlah SDM pada divisi tersebut masih relatif sedikit (< 5 orang). Untuk instansi, hanya ada 13.5% yang memiliki bagian Pusat Komputer/SIM.
- b. Untuk instansi, hanya ada 9 instansi yang mempunyai SDM bidang IT dengan tingkat pendidikan yang beragam, D III s/d S2.
- c. Untuk kesiapan SDM pada instansi, Pejabat Pemerintah Kota Denpasar yg familiar menggunakan komputer 16.67% dan internet 11.54%, sedangkan untuk level staf yg familiar dgn komputer 27% dan internet 10.71%).

3. Kesiapan Infrastruktur Hardware dan Software

- a. Perusahaan yang menggunakan komputer dalam operasionalnya, mencapai 78,6%, hanya jumlah unit PC masih sedikit, yaitu kurang dari 5 yang mencapai 40% dari total responden perusahaan yang sebagiannya berspesifikasi Pentium IV (66%).
- b. Semua instansi pemerintah (100%) telah menggunakan komputer dalam layanan operasionalnya, 75% diantaranya telah menggunakan PC Pentium IV. Hanya saja tidak setiap staf tersedia/menggunakan komputer, hanya 29% yang tersedia/menggunakan komputer. Hal ini menyebabkan lebih dari 50% instansi menyatakan bahwa fasilitas komputer belum memadai untuk operasional layanan. 32% instansi telah mempunyai Laptop untuk mendukung operasional.

2.5. PERMASALAHAN

Isu dan masalah mendesak yang paling fundamental saat ini adalah mengatasi kesenjangan (cultural lag) antara perilaku aparat yang masih bersifat konvensional menuju perubahan perilaku ke arah modernisasi melalui pemanfaatan media teknologi informasi seperti penggunaan sarana kerja berupa komputer dan pemanfaatan media internet dalam melakukan komunikasi dan mengakses informasi. Masalah lainnya adalah yang bersifat klasik artinya bahwa pendanaan untuk pengembangan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) sangatlah minim untuk bisa berperan dalam pembangunan e-government ke depan yang berdampak pelayanan publik pada pemerintah Kota Denpasar kurang optimal terlayani secara elektronik sesuai dengan tuntutan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan secara cepat, akurat, transparan tersebut, dengan demikian sangat diperlukan dukungan dan komitmen dari pimpinan daerah untuk memberikan dorongan bagi kemajuan dan perkembangan TIK di Kota Denpasar

Permasalahan tersebut secara umum dapat dikategorikan ke dalam permasalahan internal dan permasalahan eksternal :

- Permasalahan Internal :
 - a. Kurangnya SDM aparatur yang menguasai bidang IT.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan kinerja.
 - c. Kurangnya aturan yang memadai dalam pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi di Kota Denpasar serta kurangnya kebijakan yang mengarah pada pembentukan ICT Center di Kota Denpasar
- Permasalahan Eksternal :
 - a. Kurang maksimalnya penggunaan Sistem Komunikasi Teknologi Informasi dalam pelaksanaan transformasi Komunikasi dan informasi secara elektronik antar SKPD.
 - b. Gangguan signal networking dalam penggunaan wireless
 - c. Kurangnya pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, pembangunan sarana telekomunikasi, warung seluler serta warung internet

2.6. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN

Mengingat peranan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar semakin strategis dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya diperlukan perumusan kebijaksanaan dalam bentuk perencanaan strategis yang mengikuti pola berupa tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang sifatnya umum sampai dengan yang paling teknis. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki keterkaitan yang erat untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan, yang merupakan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar, yang dituangkan dalam Perencanaan Program Kerja Tahunan (Renja), Jangka Menengah dan Jangka Panjang dalam bentuk Rencana Strategis, yang diharapkan makin meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsi dibidang teknologi informasi dan komunikasi serta pos dan telekomunikasi.

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Visi Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Denpasar yaitu Mewujudkan Pembangunan Kota Denpasar yang berwawasan Budaya yang dijiwai Agama Hindu dan dilandasi Tri Hita Karana dengan Prioritas Pembangunan diletakkan pada sektor budaya, pariwisata, perdagangan, jasa, industri dan sektor pertanian sebagai sektor unggulan (Core Competency) dan mendorong sektor pelayanan dasar, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi lokal dengan pembenahan kelembagaan secara menyeluruh melalui sistem ekonomi kerakyatan.

Terkait dengan visi dan prioritas pembangunan tersebut, maka e-Government Kota Denpasar perlu memiliki visi yang sejalan dengan visi dan prioritas pembangunan di atas yaitu “Menjadi Kota yang Unggul dan Prima dalam penyelenggaraan pemerintahan (Government), pelayanan publik (Citizen) dan ketahanan ekonomi (Business) yang Berwawasan Budaya.

Dari visi ini dapat diterjemahkan bahwa e-Government yang diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. Kata unggul mengandung makna

upaya nyata peningkatan kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan masyarakat, sedangkan kata prima mengandung makna efisien, efektif, adil dan transparan, dimana hal ini dapat diwujudkan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Selain visi dan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Denpasar tersebut, perlu juga diselaraskan dengan sasaran umum, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan Telematika yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Denpasar. Adapun sasarannya adalah (1) Terwujudnya penyelenggaraan Telematika yang efisien, yaitu mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek sosial dan komersial, (2) Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan telematika, (3) Meningkatnya kapasitas serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan mendayagunakan teknologi dan aplikasi telematika secara efektif.

Untuk mengintegrasikan seluruh implementasi e-Government dibutuhkan standar dan aturan-aturan pendukung yang dapat dijadikan acuan utama dalam pengembangan e-Government untuk seluruh instansi. Agar standar dan panduan tersebut dapat diadaptasi oleh seluruh instansi di Pemerintah Kota Denpasar secara lebih sistematis dan terpadu, maka perlu diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi yang lebih terperinci dan memudahkan mengikuti tahapan-tahapan kunci yang memungkinkan hasil yang ingin dicapai dapat lebih terukur. Blueprint e-Government merupakan salah satu panduan yang lebih terperinci yang memudahkan pemerintah Kota Denpasar melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan e-Government.

Blueprint dasar yang harus tersedia adalah blueprint pengembangan sumber daya manusia, blueprint pengembangan infrastruktur jaringan dan blueprint pengembangan aplikasi.

Agar blueprint menjadi sebuah acuan standar yang dapat mengantisipasi adanya perubahan akibat kemajuan teknologi dan dinamika otonomi daerah, blueprint didesain dengan prinsip keseimbangan antara flexibility (konsisten namun dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang spesifik) dan standardization.

Dengan memahami implementasi e-Government yang benar dan mengacu kepada blueprint yang sudah dibuat, akan mendorong seluruh instansi Pemerintah

Kota Denpasar mewujudkan visi serta turut mensukseskan terciptanya public good governance melalui e-Government.

Prioritas Pembangunan Kota Denpasar diletakkan pada sektor Budaya, Pariwisata, perdagangan, jasa, industri dan sektor pertanian sebagai sektor unggulan (Core Competency) dan mendorong sektor pelayanan dasar, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi lokal dengan membenahan kelembagaan secara menyeluruh melalui sistem ekonomi kerakyatan

Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut dan mengacu pada tingkatan atau tahapan pengembangan e-Government, yaitu :

1. Tahap pertama, e-Government dikembangkan sebagai internally-networked public-service provider.
2. Tahap kedua, e-Government dikembangkan menjadi externally-networked public-service provider
3. Tahap ketiga meloncat ke externally-networked economic development oriented.

Tahap pertama telah diawali dengan pembangunan infrastruktur jaringan antar instansi dan pembangunan berbagai sistem informasi di beberapa instansi, hanya saja perlu dikembangkan kearah pemanfaatan infrastruktur jaringan tersebut untuk operasional dan koordinasi antar instansi.

Tahap kedua telah dimulai dengan telah terbentuknya Dinas Perijinan, tempat mengurus perijinan dalam satu atap. Kondisi ini tinggal dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan seluruh instansi perijinan secara online. Sesuai dengan visi pengembangan e-Government, pendekatan “layanan satu atap” perlu tetap dipegang dalam layanan tahap kedua ini, selain faktor efektif, efisien, transparan juga masyarakat pengguna jasa tidak perlu tahu lokasi asal atau instansi pemberi layanan, pengguna tinggal datang ke Dinas Perijinan dan mendapat layanan sesuai jenis layanan yang diperlukan.

Tahap ketiga baru bisa dilakukan jika Pemerintah Kota Denpasar memfasilitasi terbentuknya komunitas lokal yang berbasis TIK, seperti membangun Banjar-Net yang merupakan komunitas ditingkat bawah agar dapat memanfaatkan TIK untuk peningkatan wawasan dan perekonomian mereka. Ketiga pentahapan tersebut akan dijabarkan dalam tahapan pengembangan e-Government untuk kurun waktu 5 tahun. Tahun 2011-2012 adalah tahun pembangunan dan penetrasi infrastruktur, tahun 2013-2014 adalah tahun integrasi dan tahun 2015 adalah tahun layanan online.

a. Tahap Pengembangan

Tahapan pengembangan e-Government dijabarkan dalam beberapa komponen yaitu sumber daya manusia, infrastruktur aplikasi, infrastruktur data dan informasi, infrastruktur jaringan serta komponen kebijakan.

Penyusunan tahapan ini tetap mengacu pada Visi, hasil analisis SWOT, strategi pengembangan dan juga rencana pengembangan e-Government Nasional. Pencapaian dari tahapan-tahapan ini dilakukan melalui inisiatif-inisiatif implementasi e-Government, adapun inisiatif implementasi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada tahap pengembangan sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan tim teknis TIK yang akan melakukan transfer keahlian kepada sumber daya manusia di masing-masing instansi (para Pranata Komputer) dan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya TIK. Pelatihan-pelatihan yang diberikan adalah tentang pengelolaan website instansi, pengelolaan jaringan komputer, pengelolaan database serta pelatihan perawatan teknologi informasi. Selain peningkatan kemampuan dalam bidang TIK, sumber daya manusia di tiap instansi juga diberikan wawasan tentang sistem keamanan komputer, penerapan SIN dan aturan jabatan fungsional perekayasa. Dalam 5 tahun ke depan diharapkan tiap instansi telah memiliki sumber daya manusia yang mampu dalam mengelola sumber daya TIK di masing-masing instansinya.

2. Tahap Pengembangan Infrastruktur Aplikasi

Pada tahap pengembangan infrastruktur aplikasi dimulai dengan identifikasi aplikasi di tiap instansi sehingga diketahui kebutuhan akan data, jaringan dan aplikasi lain yang terkait. Dalam pengembangan aplikasi diarahkan ke open source sehingga memudahkan dalam pengembangan selanjutnya. Disamping standarisasi dalam open source perlu juga diarahkan setiap aplikasi yang berkaitan dengan penduduk untuk menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai kunci utama integrasi. Pengembangan dalam 5 tahun ke depan diharapkan telah terbentuk data center dan berbagai layanan aplikasi online, termasuk pemilihan walikota online.

3. Tahap Pengembangan Infrastruktur Data dan Informasi

Pada tahap pengembangan infrastruktur data dan informasi diharapkan dalam 5 tahun ke depan berhasil di bangun datawarehouse. Datawarehouse adalah suatu koleksi terintegrasi, database yang berorientasi subyek, bervariasi waktu, dan tetap, yang didesain untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi pengambil keputusan. Datawarehouse ini yang akan dipakai sebagai sumber analisis perencanaan dan evaluasi pembangunan.

4. Tahap Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komputer

Pada tahap pengembangan infrastruktur jaringan komputer diharapkan dalam 5 tahun ke depan telah terbangun jaringan beserta sistem keamanannya di seluruh instansi. Untuk kemudahan dan keamanan dalam pengelolaan infrastruktur jaringan komputer perlu dibangun NOC (Network Operation Center). Peningkatan jumlah komputer yang terhubung ke jaringan harus diimbangi dengan peningkatan bandwidth. Untuk memperluas jaringan khususnya fasilitas akses Internet masyarakat, tiap tahunnya dilakukan penambahan terminal akses bagi masyarakat.

5. Tahap Pengembangan Kebijakan

Pada tahap pengembangan kebijakan diharapkan terciptanya beberapa kebijakan dalam hal jabatan fungsional pranata komputer, penerapan Single Identity Number (SIN), serta kebijakan dalam penyusunan masterplan jangka panjang.

HAL – HAL LAIN YANG DIANGGAP PENTING

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan

urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja. Dalam penerapannya,

SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Disamping itu, perlu dipahami bahwa SPM berbeda dengan Standar Teknis, karena Standar Teknis merupakan faktor pendukung pencapaian SPM. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk :

1. Terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu.
2. Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar menentukan kebutuhan pembiayaan daerah.
3. Menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan.

4. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauhmana Pemerintahan Daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik.
5. Memperjelas tugas pokok Pemerintahan Daerah dan mendorong terwujudnya *checks and balances* yang efektif.
6. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun penerapan SPM bidang komunikasi dan informasi dapat di lihat pada tabel 7 dan tabel 8 berikut:

Tabel 7

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DENPASAR

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Pembangunan di Kota Denpasar	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan melalui:			Dinas Kominfo Kota Denpasar
		- media massa (surat kabar, radio, televise)	12 kali per tahun	2015	
		- media on line (<i>website Kota Denpasar</i>)	Setiap hari	2015	
		- media tradisional (Pertunjukan rakyat)	12 kali per tahun	2015	
		- media interpersonal (seminar, sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya)	12 kali per tahun	2015	
		- media luar ruang (buletin, <i>leaflet</i> , <i>booklet</i> , per	12 kali per	2015	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
		brosur, spanduk, baliho, papan informasi)	tahun		
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Kecamatan di Kota Denpasar	20% per tahun	2015	Dinas Kominfo Kota Denpasar
	Pelaksanaan Pengembangan e-Government di Kota Denpasar	Cakupan Pelaksanaan pengembangan e-government di Kota Denpasar :			Dinas Kominfo Kota Denpasar
		- Pengembangan aplikasi e-government	15 aplikasi per tahun	2015	
		- Pengembangan integrasi system informasi dan bank data	1 kali per tahun	2015	
		- Pengembangan dan pembangunan ICT Center dan media center	1 kali	2015	
		- Pengembangan dan pembangunan infrastruktur jaringan dalam peningkatan layanan publik	10 skpd per tahun	2015	
		- Penyediaan akses internet untuk jaringan pedesaan	10 unit per tahun	2015	
		- Pelaksanaan pelayanan dan monitoring jaringan SKPD di Lingkungan Kota Denpasar	204 kali per tahun	2015	
4	Tata laksana penyelenggaraan pengawasan dan pengelolaan jasa layanan internet dan layanan on line di Kota Denpasar	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dan pengelolaan jasa layanan internet dan layanan on line di Kota Denpasar	20% per tahun	2015	Dinas Kominfo Kota Denpasar

Table 8

**CAPAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DENPASAR**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	2011		2012		2013		2014		2015		K E T
			TARGET	CAPAI AN	TARGET	CAPAI AN	TARGET	CAPAI AN	TARGE T	CAPAI AN	TAR GET	CAP AIAN	
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Pembangunan di Kota Denpasar	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan melalui:											
		- media massa (surat kabar, radio (RPKD), televise)	-	-	-	-	12 kali	80%	12 kali	90%	12 kali	100 %	
		- media on line (<i>website Kota Denpasar</i>)	-	-	-	-	100%	75%	100%	90%	100 %	100 %	
		- media tradisional (Pertunjukan rakyat)	-	-	-	-	12 kali	50%	12 kali	75%	12 kali	100 %	
		- media interpersonal (seminar, sarasehan, ceramah/ diskusi, dan lokakarya)	-	-	-	-	6 kali	50%	12 kali	75%	12 kali	100 %	
		- media luar ruang (buletin, <i>leaflet</i> , <i>booklet</i> , brosur, spanduk, baliho, papan informasi)	-	-	-	-	12 kali	50%	12 kali	75%	12 kali	100 %	
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Kecamatan di Kota Denpasar	-	-	-	-	20 %	25%	20 %	50%	20 %	100 %	
3	Pelaksanaan Pengembangan e-Government di Kota Denpasar	Cakupan Pelaksanaan pengembangan e-government di Kota Denpasar :											
		- Pengembangan aplikasi e-government	20 buah aplikasi	50%	20 buah aplikasi	60%	20 buah aplikasi	70%	20 buah aplikasi	85%	20 buah aplikasi	100 %	
		- Pengembangan integrasi system informasi dan bank data	1 kali	30%	1 kali	50%	1 kali	70	1 kali	90%	1 kali	100 %	
		- Pengembangan dan pembangunan					1 kali	100%					

		ICT Center dan media center											
		- Pengembangan dan pembangunan infrastruktur jaringan dalam peningkatan layanan publik	43 SKPD	50%	59 SKPD	75%	68 SKPD	83%	77 SKPD	91%	86 SKPD	100%	
		- Penyediaan akses internet untuk jaringan pedesaan	-	-	8 unit jaringn	40%	11 unit jaringn	60%	14 unit jaringan	80%	16 unit jaringan	100%	
		- Pelaksanaan pelayanan dan monitoring jaringan SKPD di Lingkungan Kota Denpasar	-	-	204 kali	50%	204 kali	65%	204 kali	85%	204 kali	100%	
4	Tata laksana penyelenggaraan pengawasan dan pengelolaan jasa layanan internet dan layanan on line di Kota Denpasar	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dan pengelolaan jasa layanan internet dan layanan on line di Kota Denpasar	172 buah	25%	172 buah	50%	172 buah	70%	172 buah	85%	172 buah	100%	

BAB III ISU STRATEGIS

3.1. ISU STRATEGIS

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik atau pelayanan prima menjadikan pemerintah daerah mau tak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang menjanjikan efisiensi yang tinggi dan pelayanan yang lebih baik. Mengingat pengembangan e-Government merupakan sebuah proses transformasi dari manual ke elektronik, maka dibutuhkan upaya-upaya sistematis yang menyangkut subyek, obyek dan metoda yang terkait dengan proses transformasi tersebut. Proses transformasi ini mengacu pada tiga hal, yaitu perundang-undangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kondisi saat ini dan pengaruh lingkungan yang bersumber pada tuntutan layanan publik serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

Sedangkan kerangka berpikir untuk tingkatan tahapan pengembangan e-Government mengacu pada usulan tahapan pengembangan, dimana pengembangan e-Government Kota Denpasar mengarah atau berorientasi ke pembangunan ekonomi jangka panjang serta pada semua pelayanan public melalui internet (ekstranet).

Terkait dengan visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar, yaitu **Visi : Untuk mewujudkan Denpasar Kreatif Berbasis Budaya Unggulan Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan**, dengan **Misi (4) : Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (welfare society)**. Maka e-Government Kota Denpasar perlu memiliki visi yang sejalan dengan Pemerintahan Kota Denpasar yaitu **"Menjadi Kota yang Unggul dan Prima dalam penyelenggaraan pemerintahan (Government), pelayanan publik (Citizen) dan ketahanan ekonomi (Business) yang berbasis budaya unggulan"**. Dari visi ini dapat diterjemahkan bahwa e-Government yang diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak

swasta. Kata unggul mengandung makna upaya nyata peningkatan kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan masyarakat, sedangkan kata prima mengandung makna efisien, efektif, adil dan transparan, dimana hal ini dapat diwujudkan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar yang mengacu pada Perda No : 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar secara optimal telah mampu menyeimbangkan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kondisi sekarang, namun untuk menjaga keutuhan sistem teknologi serta untuk pengembangan jaringan informasi terpadu perlu dilakukan peningkatan dalam pemeliharannya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pengelolaan dan peningkatan sistem teknologi, informasi dan Komunikasi sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai terutama masalah Sumber Daya Manusia (SDM), Hardware dan Software yang menjadi pendukungnya. Dengan demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar nantinya bisa eksis dan dapat berperan secara aktif dalam pembangunan Kota Denpasar utamanya dalam dunia informatika dan komunikasi lainnya di Kota Denpasar.

3.2. ANALISA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkannya akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi. Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (weakness) dan ancaman (threat) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

Formulasi strategis atau yang biasanya disebut dengan perencanaan strategis merupakan proses penyusunan perencanaan jangka panjang. Karena itu prosesnya

lebih banyak menggunakan proses analisis. Jadi di dalam perencanaan strategis ini analisis-analisis baik pada tingkat korporat maupun pada tingkat bisnis sangat dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk menyusun strategi sehingga sesuai dengan misi, sasaran serta kebijakan suatu organisasi. Analisa SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu kegiatan. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam kata lain, Analisa SWOT adalah sebuah instrumen yang beraneka guna, yang dapat digunakan berkali-kali pada berbagai tahap kegiatan. Analisa SWOT dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang terlibat sebagai inputan untuk perencanaan proses sehingga proses yang dirancang dapat berjalan optimal, efektif dan efisien. SWOT berasal dari kata-kata Strengths (kekuatan, Weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Analisa SWOT membandingkan antara faktor eksternal dan faktor internal :

1. Analisa eksternal, perusahaan menggali dan mengidentifikasikan semua opportunity (peluang) yang berkembang dan menjadi tren pada saat itu serta Threat (ancaman) dari globalisasi.
2. Analisa Internal, lebih memfokuskan pada identifikasi Strengths (kekuatan) dan Weakness (kelemahan) dari suatu organisasi. Analisa SWOT merupakan instrumen yang ampuh dalam melakukan analisa statejik, kemampuan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi organisasi untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi.
3. Faktor Kekuatan (Strengths)
Strengths merupakan kondisi internal yang menunjang suatu organisasi/ perusahaan untuk mencapai objektif yang diinginkan. Faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk satuan-satuan di dalamnya adalah antara lain kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi/ perusahaan yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit-unit yang ada.
4. Faktor kelemahan (weaknesses)

Weaknesses merupakan kondisi internal yang menghambat organisasi/perusahaan untuk mencapai objektif yang diinginkan. Faktor kelemahan yang dimaksud adalah keterbatasan dan kekurangan kemampuan dalam hal sumber, ketrampilan dan kemampuan, seperti kemampuan manajerial yang rendah, ketrampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang tidak ada atau kurang dimintai oleh pengguna dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai.

5. Faktor peluang (*opportunities*) *Opportunities* adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan organisasi.
6. Faktor Ancaman (*Threats*) *Threats* adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan pengembangan Bidang Komunikasi Informasi serta pos dan telekomunikasi ada beberapa komponen pokok yang akan dianalisis yaitu sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak/aplikasi, jaringan komputer/Internet, Data dan Informasi, pelayanan masyarakat, organisasi. Komponen tersebut dianalisis letak kekuatannya (*Strengths*), kelemahannya (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threats*). Analisis SWOT ini dipakai sebagai dasar penentuan rencana pengembangan e-Government.

Dari analisis ini maka dapat dilakukan evaluasi diri untuk berbenah diri membangun sistem e-Government yang handal dan terpadu. Selain itu, dengan analisis SWOT tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian untuk dapat mencapai kondisi yang memungkinkan untuk membangun dan mengembangkan e-Government. Strategi pengembangan e-Government menurut prioritas selanjutnya dapat dibangun berdasarkan analisis SWOT yang telah disusun, disesuaikan dengan kondisi riil yang ada di Pemerintah Kota Denpasar.

Analisis dan matrik SWOT yang disusun dapat dilihat pada tabel 9 dan tabel 10 berikut :

Tabel 9
Analisis SWOT

Komponen	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> Adanya kesadaran dari SDM mengenai perlunya Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik Terdapat SDM yang peduli dengan pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintah Kota Adanya rekrutmen SDM berlatar belakang pendidikan komputer dalam formasi CPNS 	<ol style="list-style-type: none"> Prosentase penguasaan dan penggunaan teknologi informasi masih rendah Masih rendah SDM berlatar belakang pendidikan komputer Belum terorganisirnya SDM berlatar belakang pendidikan komputer Frekuensi bimbingan teknis SDM tentang teknologi informasi masih rendah dan tidak kontinyu 	<ol style="list-style-type: none"> Banyak sumber dan narasumber untuk proses pembelajaran di bidang teknologi informasi dan komunikasi Teknologi Informasi semakin siap pakai dan berdaya guna Terdapat tenaga ahli yang kompeten dengan pengembangan e-Government Banyaknya perguruan tinggi komputer yang dapat melakukan link and match 	<ol style="list-style-type: none"> Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat Kurangnya penguasaan pemanfaatan teknologi informasi akan mengakibatkan tertinggal dari daerah lain SDM menggunakan teknologi informasi khususnya Internet dengan tidak produktif
Perangkat Keras	<ol style="list-style-type: none"> Semua instansi telah memiliki komputer dengan jumlah yang beragam Terdapat beberapa komputer server yang memadai Hampir semua H/W sudah dioperasikan 	<ol style="list-style-type: none"> Perawatan H/W kurang diperhatikan Kebanyakan tidak punya penanggung jawab kerusakan Belum memiliki SOP penanganan perangkat keras Belum memiliki Network Operation Center (NOC) sebagai sentralisasi seluruh server 	<ol style="list-style-type: none"> Harga H/W relatif semakin murah dan H/W mudah di up-grade Komputer sudah dianggap sebagai kebutuhan standar Kemampuan dan dayaguna H/W semakin canggih dan lengkap Mudah didapatkan di pasaran 	<ol style="list-style-type: none"> Perkembangan H/W sangat pesat sehingga H/W yang ada cepat ketinggalan jaman Kemajuan teknologi S/W berdampak pada kebutuhan H/W yang canggih Meningkat jumlah data membutuhkan media penyimpanan yang besar
Perangkat Lunak / Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> Website beberapa kali memperoleh Award tingkat nasional dan pernah mewakili Indonesia di ajang Internasional Pernah meraih peringkat 3 Nasional dalam implementasi e-Government Website sudah menggunakan Content Management System (CMS) 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan S/W masih parsial belum terintegrasi dan terpadu Belum terdapat urutan prioritas dalam pengembangan aplikasi Belum ada sistem yang terpadu (single sign-on system) Paket program ada yang masih bajakan 	<ol style="list-style-type: none"> S/W semakin mudah dipelajari (<i>user friendly</i>) Kemampuan S/W semakin canggih Ketersediaan S/W semakin lengkap Banyak perusahaan dan perguruan tinggi komputer pembuat software Tersedianya open source software (OSS) 	<ol style="list-style-type: none"> Perkembangan S/W sangat cepat S/W mutakhir selalu menuntut H/W yang canggih Gencarnya pemberantasan software bajakan Kebijakan pemerintah pusat mengharuskan menggunakan open

Komponen	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
	<ul style="list-style-type: none"> untuk seluruh instansi 4. Sudah ada aplikasi untuk mendukung perijinan dan lelang 5. Sudah memanfaatkan aplikasi mobile (SMS) 			<ul style="list-style-type: none"> source software (OSS)
Jaringan / Internet	<ul style="list-style-type: none"> 1. Seluruh SKPD telah mempunyai jaringan <i>intranet</i> dan <i>Internet</i>. 2. Ada keinginan untuk mengintegrasikan data-data untuk kepentingan pelayanan publik lewat jaringan 3. Lokasi seluruh instansi dapat terjangkau baik lewat jaringan kabel (Fiber Optic) maupun wireless 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sedikit sekali instansi yang memiliki tenaga administrator ataupun operator jaringan yang handal 2. Penguasaan komputer dan Internet, baik pimpinan maupun staf masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Teknologi jaringan sudah murah dan mudah didapat di pasaran. 2. Pengembangan aplikasi jaringan sudah lebih mudah dan cepat. 3. Database terpusat maupun tersebar sangat mudah diimplementasikan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat sudah melek <i>internet</i>, membuat mereka lebih suka mendapatkan informasi yang terpasang di <i>Web</i>. 2. Investor lebih tertarik pada pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Tuntutan penyajian informasi yang cepat dan akurat
Data / Informasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesadaran pentingnya data yang akurat dan terintegrasi 2. Tersedianya H/W dan S/W pemroses data 3. Tersedianya tenaga siap latih 4. Memiliki data kependudukan yang akurat sebagai kunci integrasi dengan data lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum ada Basis Data terpadu 2. Informasi/data antar aplikasi dan antar instansi belum terintegrasi 3. Belum ada prosedur standar penanganan data 4. Organisasi dan kelengkapan data masih belum baik (masih kesulitan dalam mencari informasi yang diperlukan) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi yang canggih dan berdayaguna 2. H/W dan S/W pemroses data semakin lengkap dan canggih 3. Banyak Pakar (penyedia jasa) di bidang pengolahan data (sistem informasi) 4. Ada sistem Basis Data Terdistribusi ataupun terpusat yang terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan masyarakat tentang informasi dan pelayanan 2. Tuntutan masyarakat akan transparansi 3. Data/Informasi yang salah bisa menjerumuskan 4. Keamanan dan penyalahgunaan data
Organisasi, Sistem Manajemen dan Proses Kerja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan puncak memiliki e-leadership yang baik 2. Adanya kesadaran pentingnya komunikasi 3. Adanya kesadaran pentingnya keterpaduan pelayanan 4. Seluruh instansi terhubung lewat jaringan sehingga 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya keinginan <i>sharing</i> sumber daya/ data 2. Ketersediaan dan kualitas peralatan antar bidang tidak merata 3. SDM dalam bidang teknologi informasi antar instansi tidak merata dan kurang terorganisir 4. Penyediaan dana untuk 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi yang canggih dan berdayaguna 2. Banyak pakar yang gigih mengembangkan e-<i>Government</i> 3. Banyak best practise e-<i>Government</i> yang dapat dirujuk 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Data/Informasi yang tidak berkualitas akan menurunkan wibawa pemerintah 2. Tuntutan kecepatan pelayanan untuk masyarakat 3. Masyarakat semakin

Komponen	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
	memudahkan komunikasi dan diseminasi informasi	menangani <i>e-Government</i> belum terpadu	4. Adanya Otonomi Daerah yang semakin mendekati pelayanan kepada masyarakat	kritis
Pelayanan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase penggunaan komputer (<i>stand-alone</i> dan jaringan) dalam pelayanan masyarakat cukup 2. Tingginya keinginan masyarakat umum dan bisnis untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan terpadu 3. Tersedianya website untuk menyampaikan kritik dan saran 4. Adanya KIOSK layar sentuh untuk informasi kota Denpasar dan perijinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi keberadaan webiste pemerintah kota 2. Waktu menanggapi kritik dan saran yang masih lama 3. Pemanfaatan teknologi informasi di tingkat desa/kelurahan serta kecamatan masih rendah 	1. Informasi layanan terpadu dapat ditingkatkan dengan layanan <i>e-Government</i>	1. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, tepat dan terpadu
Peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada Inpres no 3 th 2003 2. Undang-undang ITE 3. Surat Edaran Men PAN tentang software legal atau open source 	Belum ada petunjuk pelaksanaan	Otonomi daerah memungkinkan pembuatan peraturan pelaksanaan <i>e-Government</i> pada tingkat Pemerintah Kota	Tuntutan kepastian hukum akan produk dari <i>e-Government</i>

Tabel 10.
Matrik Analisis SWOT

<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">Internal</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;">Eksternal</div> </div>	<p>Peluang (O):</p> <p>Teknologi informasi dan komunikasi dapat mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat</p> <p>Ketersediaan konsultan e-Government</p> <p>Banyak sumber dan narasumber untuk proses pembelajaran di bidang teknologi informasi dan komunikasi</p>	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat 2. Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan Informatif 3. Dinamika masyarakat yang menuntut
	<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan memiliki e-leadership yang baik 2. Ketersediaan S/W, H/W dan jaringan yang cukup. 3. Beberapa kali memperoleh award untuk website terbaik dan pengembangan e-Government 4. Sudah memiliki SDM berlatar belakang komputer 	<p>S1-O1 : Manfaatkan e-leadership pimpinan yang peduli dengan <i>e-Government</i> dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat</p> <p>S2-O1: Manfaatkan Ketersediaan S/W, H/W dan jaringan untuk mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat</p> <p>S1-O2 : Optimalkan konsultan e-Government untuk meraih prestasi di bidang e-Government</p>
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang menguasai dan menggunakan teknologi informasi masih rendah dan belum merata Pengembangan S/W, H/W serta pengelolaan data belum terintegrasi dan terpadu 3. Perlu waktu yang lama untuk mendapatkan informasi online yang <i>up to date</i> (menanggapi kritik saran di web) 4. SDM berlatar belakang komputer belum terorganisir dengan baik 	<p>W1-O1: Tingkatkan kemampuan SDM yang terampil dalam penggunaan teknologi informasi untuk mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat</p> <p>W1-O3: Manfaatkan sumber dan narasumber untuk meningkatkan kemampuan SDM</p> <p>W2-O2: Sempurnakan sistem pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi serta pengelolaan data yang belum terintegrasi dan handal dengan memanfaatkan ketersediaan konsultan <i>e-Government</i></p> <p>W3-O1: Tingkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk update informasi di web</p> <p>W4-O2: pengorganisasian SDM berlatar belakang komputer bisa memanfaatkan ketersediaan konsultan e-Government</p>	<p>W1-T1: SDM diberi penguasaan teknologi informasi yang terbaru</p> <p>W2-T1: Hindari kesalahan distribusi dan penempatan SDM yang tidak sesuai ketrampilan untuk mengurangi dampak perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat</p> <p>W2-T2 : Hindari kelemahan sistem pengembangan S/W, H/W serta pengelolaan data yang belum terintegrasi dan handal untuk mengurangi ketidakpuasan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu, serta ketersediaan informasi yang akurat dan informatif</p>

Kesesuaian Visi dan Misi

Visi Pemerintah Kota Denpasar, seperti yg tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Denpasar yaitu mewujudkan pembangunan Kota Denpasar yang berwawasan Budaya yang dijiwai Agama Hindu dan dilandasi Tri Hita Karana dengan Prioritas Pembangunan diletakkan pada sektor Budaya, Pariwisata, perdagangan, jasa, industri dan sektor pertanian sebagai sektor unggulan (Core Competency) dan mendorong sektor pelayanan dasar, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi lokal dengan pembenahan kelembagaan secara menyeluruh melalui sistem ekonomi kerakyatan.

Selain visi dan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Denpasar tersebut, perlu juga diselaraskan dengan sasaran umum, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan Telematika yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Denpasar. Adapun sasarannya adalah (1) Terwujudnya penyelenggaraan Telematika yang efisien, yaitu mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan kemanfaatan aspek sosial dan komersial, (2) Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan telematika, (3) Meningkatnya kapasitas serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan mendayagunakan teknologi dan aplikasi telematika secara efektif.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. VISI

Perubahan adalah fenomena alamiah yang mesti terjadi, dimana perubahan berimpit dengan ruang dan waktu (*space and time*). Pembangunan merupakan perubahan sistemik yang didasari dan dikendalikan oleh keinginan manusia yang harus mempertimbangkan aspek masa lalu (atita), masa kini (nagatha), dan masa datang (wartamana). Spektrum pembangunan merupakan amanat hakiki seluruh masyarakat yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Dengan berpijak pada perubahan ke arah yang lebih baik, maka Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar tahun 2010 – 2015 adalah :
“Terwujudnya Kota Denpasar sebagai Kota Informasi melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang berbasis budaya unggulan dalam keseimbangan menuju keharmonisan”

4.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sebagai penjabarannya dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai, dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak.

Adapun Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. **Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika guna mencapai efisiensi dan efektifitas kerja**
2. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika.**

4.3. TUJUAN

Penjabaran misi dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih realistis akan tampak pada pernyataan tujuan, sasaran dan langkah strategis yang harus dilakukan dalam rencana kerja tahunan.

Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. **Mengembangkan jaringan informasi secara terpadu serta terciptanya komunikasi yang efektif dalam penyelenggaraan teknologi informasi**

4.4. SASARAN

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran yang harus dicapai dalam pencapaian visi dan misi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Adapun sasarannya adalah sebagai berikut :

1. **Berkembangnya Jaringan informasi secara terpadu di seluruh lapisan masyarakat**
2. **Berkembangnya Tata Kelola Pemerintahan berbasis e-goverment**
3. **Terwujudnya peningkatan Kualitas pelayanan publik**
4. **Meningkatkan kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi**

4.5. STRATEGI

Strategi merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Strategi, hal yang diperhatikan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan Eksternal (Peluang dan tantangan) suatu organisasi. Adapun Strategi dalam pencapaian visi dan misi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar adalah : **“Meningkatkan penguasaan serta mengembangkan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi “.**

4.6. ARAH KEBIJAKAN

Adapun arah kebijakan dalam pencapaian visi dan misi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. **Mengembangkan pelayanan yang berbasis teknologi informasi**
2. **Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi**
3. **Mengembangkan aplikasi e-government**

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar telah menyusun berbagai program dalam rangka Mengembangkan jaringan informasi secara terpadu yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

5.1. RENCANA PROGRAM

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program untuk program lima tahun ke depan. Adapun program dimaksud adalah

- 1. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**
- 2. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi**
- 3. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**
- 4. Kerjasama informasi dengan mass media**
- 5. Pelayanan Administrasi Perkantoran**
- 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- 7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

5.2. KEGIATAN

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Dinas Kominfo Kota Denpasar mempunyai beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu :

1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
3. Penelitian dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Pengadaan alat studio dan komunikasi
5. Pengkajian dan pengembangan system informasi
6. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
7. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
8. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
9. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
10. Pelayanan Administrasi Perkantoran
11. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
12. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sehubungan dengan hal tersebut, Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar adalah :

1. Tahun 2011

No	Nama Program dan Kegiatan	(%) Penyelesaian Pekerjaan	Alokasi Dana (Rp)
1	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi / Interface website	100 %	40.150.000,-
2	Batam ICT Expo 2011	100 %	280.870.000,-
3	Pengkajian dan pengembangan sistem berupa penyusunan dan pemutakhiran data melalui sistem aplikasi bank data	100 %	34.900.000,-
4	Pameran Pembangunan (HUT RI)	100 %	81.500.000,-
5	Pameran Pembangunan (HUT Kota Denpasar)	100 %	212.700.000,-
6	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi lainnya melalui pelayanan publik	100 %	449.010.000,-
7	Pengadaan alat studio dan komunikasi berupa operasional dan penambahan peralatan/kelengkapan M-Cap di Kota Denpasar	100 %	186.925.000,-
8	Lomba Rally photo dalam rangka HUT Kota Denpasar ke 19	100 %	60.000.000,-
9	Pengadaan alat studio dan komunikasi berupa Pengembangan jaringan internet di Pantai Matahari Terbit	100 %	94.000.000,-
10	Pengembangan jaringan internet di Kelurahan se-Kota Denpasar	100 %	439.150.000,-
11	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi berupa pemanfaatan perangkat lunak legal dan open source software	100 %	88.847.000,-
12	Pembuatan reklame pelayanan masyarakat	100 %	25.000.000,-
13	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.356.866.000,-
14	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	357.350.000
15	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100 %	75.000.000

2. Tahun 2012

No	Nama Program dan Kegiatan	(%) Penyelesaian Pekerjaan	Alokasi Dana (Rp)
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
	- Pengadaan alat studio berupa komunikasi berupa operasional dan penambahan peralatan / kelengkapan M-CAP Kota Denpasar	100 %	184.475.000
	- Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi berupa pengembangan jaringan SIK	100%	126.490.000
	- Penyebarluasan informasi pembangunan melalui pameran HUT Provinsi Bali	100%	163.280.000
	- Penyebarluasan informasi pembangunan melalui pameran HUT Kota Denpasar	100%	136.000.000
	- Penyebarluasan informasi pembangunan melalui pameran Batam ICT Expo 2012	100%	291.112.000
	- Penyebarluasan informasi dan komunikasi, pelayanan publik melalui informasi keliling Kota Denpasar	100%	20.000.000
	- Operasional pelayanan sound system di Kota Denpasar	100%	390.146.000
	- Penyajian berita di website	100%	40.250.000
	- Kegiatan Optimalisasi Pengembangan dan Pengelolaan website Kota Denpasar pada Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	48.730.000
	- Pengelolaan website Kota Denpasar	100%	97.250.000
	- Program website komisi penanggulangan aids Kota Denpasar	100%	25.100.000
	- Pengkajian dan pengembangan sistem informasi berupa penyusunan dan pemutakhiran data melalui sistem aplikasi Bank Data	100%	29.225.000
	- Lokakarya Filateli	100%	26.000.000
	- Optimalisasi Pengembangan jaringan internet Se-Kota Denpasar	100%	127.650.000
	- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya melalui Penyiaran Publik	100%	582.205.000
	- Penyusunan rancangan peraturan terkait pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Denpasar	100%	464.510.000
	- Pengadaan Radio komunikasi mobile untuk pimpinan daerah dan kepala SKPD Kota Denpasar	100%	343.400.000
	- Pengembangan dan implementasi sistem GRMS Kota Denpasar tahap I	100%	457.800.800
	- Penyebarluasan informasi dan komunikasi melalui mobil informasi keliling	100%	72.910.000
2	Program Fasilitas peningkatan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi		
	- Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi berupa diklat bintek Mikrotik dan jaringan bagi tenaga ICT Dinas Kominfo Kota Denpasar	100%	137.190.000
	- Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan informasi tentang pemanfaatan perangkat lunak legal dan open source software Kota Denpasar	100%	40.747.000
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.402.143.000
4	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
	- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	611.870.000
5	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur		
	- Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	100%	20.000.000

3. Tahun 2013

No	Nama Program dan Kegiatan	(%) Penyelesaian Pekerjaan	Alokasi Dana (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.511.455.500
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	582.885.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	20.000.000
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa - Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi berupa pembangunan infrastruktur jaringan di Kota Denpasar	100%	214.700.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi pembangunan melalui media luar ruang	100%	16.600.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui media tradisional	100%	36.155.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui kelompok informasi masyarakat (KIM) tingkat kecamatan	100%	43.670.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui berita (breaking news) website Kota Denpasar	100%	52.080.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui pameran pembangunan HUT Kota Denpasar	100%	319.562.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui mobil informasi keliling.	100%	20.800.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui radio publik Kota Denpasar	100%	349.305.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa pemutakhiran data pada bank data Kota Denpasar	100%	22.525.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa pembinaan pengelolaan warung internet (warnet) di Kota Denpasar	100%	40.744.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa lokakarya fillateli di Kota Denpasar	100%	35.793.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi dan komunikasi M-CAP Kota Denpasar	100%	45.820.000
	- Pengkajian dan pengembangan sistem informasi berupa implementasi sistem GRMS Kota Denpasar	100%	245.567.500
5	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi - Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi berupa Bimtek Implementasi E-Project Planning on Line di Kota Denpasar	100%	145.179.000
6	Program kerjasama informasi dengan mass media - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah berupa diseminasi informasi melalui media televisi	100%	36.000.000

4. Tahun 2014

No	Nama Program dan Kegiatan	(%) Penyelesaian Pekerjaan	Alokasi Dana (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	4.235.015.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	2.543.100.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	50.000.000
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
	- Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi berupa pembangunan infrastruktur jaringan di Kota Denpasar	100%	1.405.000.000
	- Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi berupa Monitoring dan Pengecekan Jaringan se-Kota Denpasar	100%	239.890.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi dan komunikasi M-CAP Kota Denpasar	100%	183.170.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi melalui media luar ruang	100%	20.000.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi melalui media tradisional	100%	72.175.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui kelompok informasi masyarakat (KIM) tingkat kecamatan	100%	118.885.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui berita (breaking news) website Kota Denpasar	100%	118.975.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui pameran pembangunan HUT Kota Denpasar	100%	374.185.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui mobil informasi keliling.	100%	43.160.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa Desiminasi Informasi melalui Pameran Luar Daerah	100%	312.080.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa Desiminasi Informasi melalui Pameran Filately	100%	220.505.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa Desiminasi Informasi melalui lomba desain perangko	100%	81.340.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui pameran pembangunan HUT Propinsi Bali	100%	108.592.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa instalasi open source sistem pada SKPD tahap I	100%	132.630.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa pemutakhiran data pada bank data kota Denpasar	100%	27.675.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui radio publik Kota Denpasar	100%	453.250.000
	- Pengadaan alat studio mini da komunikasi studio mini pemerintah Kota Denpasar	100%	32.205.000
5	- Pengkajian dan pengembangan sistem informasi berupa pengembangan website subdomain Kota Denpasar	100%	168.595.000
	- Pengembangan Sistem Informasi berupa Pengembangan, implementasi dan Pemeliharaan Sistem GRMS Kota Denpasar	100%	224.900.000
	- Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi berupa Pengembangan Sistem Bank Data	100%	426.437.000

6	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi - Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan untuk Pranata Komputer e - Government	100%	155.720.000
7.	Program kerjasama informasi dengan mass media - Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Media Massa	100%	45.740.000

5. Tahun 2015

No	Nama Program dan Kegiatan	(%) Penyelesaian Pekerjaan	Alokasi Dana (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	2.383.029.600
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.126.000.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	40.800.000
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa - Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa Unit Pelaksana Teknis Pusat Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi	100%	3.473.814.900
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui radio publik Kota Denpasar	100%	965.667.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui pameran pembangunan HUT Propinsi Bali	100%	113.266.000
	- Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika berupa pengelolaan website, subdomain, perencanaan dan evaluasi pelaporan pada Dinas Kominfo Kota Denpasar	100%	177.347.500
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui pameran pembangunan HUT Kota Denpasar	100%	589.000.000
	- Pembangunan Data Center dan Sistem Pengolahan Data Terpadu Pada Pemerintah Kota Denpasar	100%	199.300.000
	- Pengembangan E-Gov	100%	271.007.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa penyelenggaraan Promosi Produk Teknologi Informasi	100%	608.300.000
	- Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi berupa Pembangunan Control Data Center Room Tahap 1	100%	123.000.000
	- Pengembangn Sistem Portal Pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Denpasar	100%	165.611.000
	- Pengembangan Sistem Berbasis Budaya berupa Website Beraksara Bali di Kota Denpasar	100%	198.361.000
	- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui video transormasi Kota Denpasar	100%	121.284.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa Inovasi Kinerja Pemerintah Kota Denpasar	100%	136.508.000
	- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa desiminasi informasi melalui Promosi dan Publikasi Pelayana Publik	100%	116.012.000
	- Pengembangan Aplikasi M-City	100%	99.929.000

5	Program pengkajian dan penelitian dibidang komunikasi dan informasi		
	- Penyusunan Rencana Induk Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi terpadu pemerintah kota Denpasar tahun 2016-2020	100%	211.268.000
	- Pengkajian dan Penelitian bidang informasi dan komunikasi berupa penyusunan kajian teknis pemanfaatan dan penyelenggaraan telekomunikasi di Kota Denpasar	100%	111.581.000
6	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		
	- Pelatihan SDM dalam Bidang komunikasi dan Informasi berupa seminar animasi	100%	187.260.000
7	Program kerjasama informasi dengan mass media		
	- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Masa	100%	325.276.000

5.3. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu:

- Indikator Input: gambaran mengenai sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas, dan kehematan)
- Indikator Process: gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan ketaatan terhadap ketentuan/standar).
- Indikator Output: gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi)
- Indikator Outcome: gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan

proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan)

- Indikator Dampak: gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

Type Indikator Kinerja:

1. Kualitatif: menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang)
2. Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit)
3. Persentase: menggunakan perbandingan angka absolut dari yg diukur dg populasinya (misal: 50%, 100%)
4. Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid)
5. Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat)
6. Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia)

Pengembangan Indikator Kinerja Utama:

- Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Kota dan SKPD di bawahnya

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama, Harus dipertimbangkan:

- Dokumen RPJMD
- Dokumen Renstra
- Kebijakan Umum SKPD
- Dokumen strategis lainnya yang relevan
- Bidang kewenangan, tugas dan fungsi

- Kebutuhan informasi kinerja
- Kebutuhan data statistik
- Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus Melibatkan: Pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Karakteristik Indikator Kinerja Utama:

- Spesifik
- Dapat Dicapai
- Relevan:
- Menggambarkan keberhasilan sesuatu yg diukur
- Dapat dikuantifikasi dan diukur
- Penggunaan Indikator Kinerja Utama
- Perencanaan Jangka Menengah
- Perencanaan Tahunan
- Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- Evaluasi Kinerja
- Pemantauan dan pengendalian Kinerja

Evaluasi Kinerja:

- Instansi Pemerintah melakukan Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan memperhatikan Capaian Indikator Kinerja Utama
- Analisis dan Evaluasi Kinerja dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada berupa kendala, hambatan, dan informasi lainnya.

Pembinaan dan Koordinasi, Pimpinan Instansi hendaknya melakukan:

- Pembinaan dalam pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing
- Koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yg lain, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban

Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama:

1. Tahap Pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai.
2. Tahap kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan.
3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja
4. Tahap keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama

Sumber Data Kinerja:

1. Data Kinerja Primer, Data kinerja yang diperoleh langsung dari responden
2. Data Kinerja Sekunder, Data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari instansi/pihak lain

Tingkatan Indikator Kinerja Utama

- Tingkat Satuan Kerja
- Tingkat Unit Kerja
- Tingkat Kementerian/Lembaga

5.4. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR DAN PAGU INDIKATIF

1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	- Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	1 paket 150	1 paket 150	1 paket 150	1 paket 150	1 paket 150
		- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi	1 paket 300	1 paket 300	1 paket 300	1 paket 300	1 paket 300
		- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	5 paket 500	1 paket 100	1 paket 100	1 paket 100	1 paket 100
		- Pengadaan alat studio dan komunikasi	2 paket 500	2 paket 500	2 paket 500	2 paket 500	2 paket 500
		- Pengkajian dan pengembangan system informasi	1 paket 300	1 paket 300	1 paket 300	1 paket 300	1 paket 300
		- Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	1 paket 100	1 paket 100	1 paket 100	1 paket 100	1 paket 100
2	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	- Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.	1 paket 200	1 paket 300	1 paket 300	1 paket 300	1 paket 300
3	Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	- Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	1 paket 500	1 paket 500	1 paket 500	1 paket 500	1 paket 500
4	Kerjasama informasi dengan mass media	- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1 paket 100	1 paket 100	1 paket 100	1 paket 100	1 paket 100
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 paket 1500	1 paket 1500	1 paket 1500	1 paket 1500	1 paket 1500

6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	1 paket 800	1 paket 800	1 paket 800	1 paket 800	1 paket 800
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 paket 100	1 paket 100	1 paket 100	1 paket 100	1 paket 100



BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

VI.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

Pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar dicapai dalam lima tahun ke depan dengan Program sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
3. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Pengadaan alat studio dan komunikasi
5. Pengkajian dan pengembangan system informasi
6. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
7. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
8. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
9. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
10. Pelayanan Administrasi Perkantoran
11. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
12. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar untuk Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DENPASAR
PERIODE 2010- 2015**

Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam hal komunikasi dan informatika sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar.

Fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, dalam hal ini bidang komunikasi dan informatika
 - Pemberian rekomendasi bidang teknologi informasi dan komunikasi serta pelaksanaan pelayanan umum, terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya pada bidang komunikasi dan informatika.

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6
Berkembangnya jaringan informasi di seluruh lapisan masyarakat	Persentase Kantor Pemerintah Daerah yang terhubung Jaringan FO (Fiber Optik) di Kota Denpasar	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang mendapat pengembangan dan pembangunan infrastruktur Jaringan FO (Fiber Optik) di Kota Denpasar}}{\text{Jumlah Target pada Renstra}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar	Bidang Piranti Keras dan Jaringan	
	Persentase SKPD yang terpelihara jaringan internetnya dengan baik di Kota Denpasar	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan kerusakan Jaringan}}{\text{Jumlah Pengaduan yang sudah ditindak lanjuti}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar	Bidang Piranti Keras dan Jaringan	

Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Presentase penerapan e-government /aplikasi pemerintah	$\frac{\text{Jumlah Aplikasi e - goverment}}{\text{Jumlah Target pada Renstra (57 Aplikasi)}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar	Bidang Piranti Lunak	
	Jumlah Sistem Informasi / Aplikasi yang terlaksana dalam satu tahun	Jumlah Sistem Informasi / Aplikasi yang terlaksana dalam satu tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar	Bidang Piranti Lunak	
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan yang ditindaklanjuti tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan yang masuk}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar	Bidang Bina Program	
Meningkatannya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	$\frac{\text{Jumlah kegiatan SPM}}{\text{Target SPM berdasar Permen kominfo 22 2010}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar	Bidang Pos dan Telekomunikasi	
	Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya di Bidang TIK	Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya di Bidang TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar	Bidang Bina Program	

TARGET IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)

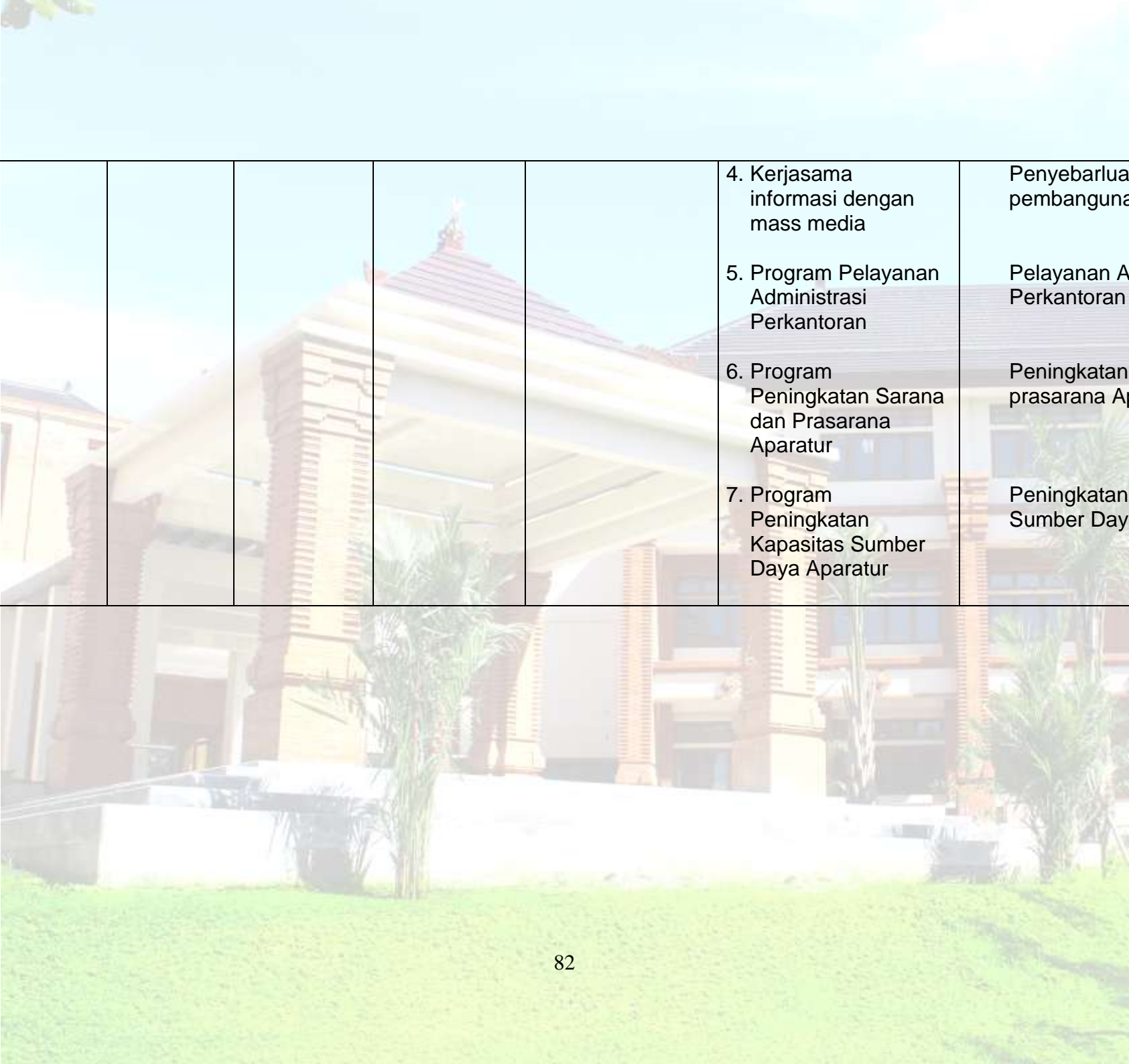
TAHUN 2011-2015

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2011-2015
1.	Berkembangnya jaringan informasi secara terpadu yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat	Persentase Kantor Pemerintah Daerah yang terhubung Jaringan FO (Fiber Optik) di Kota Denpasar	100% (19 SKPD)
		Persentase SKPD yang terpelihara jaringan internetnya dengan baik di Kota Denpasar	100%
2.	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Presentase penerapan e-government /aplikasi pemerintah	100% (57 Aplikasi)
		Jumlah Sistem Informasi / Aplikasi yang terlaksana dalam satu tahun	10 Aplikasi
3.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%
4.	Meningkatannya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	100%
		Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya di Bidang TIK	500 orang

VI.2. MATRIK RENCANA STRATEGIS

VI.2. Matrik Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar Tahun 2011 - 2015

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program/Kegiatan
Terwujudnya Kota Denpasar sebagai Kota Informasi melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang berbasis budaya unggulan dalam keseimbangan menuju keharmonisan	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika guna mencapai efisiensi dan efektifitas kerja Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika 	Mengembangkan jaringan informasi secara terpadu serta terciptanya komunikasi yang efektif dalam penyelenggaraan teknologi informasi	Mengembangkan jaringan informasi secara terpadu yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan penguasaan serta mengembangkan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan pelayanan yang berbasis teknologi informasi Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi Mengembangkan aplikasi e-government 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pengadaan alat studio dan komunikasi Pengkajian dan pengembangan system informasi Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi <p>Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.</p> <p>Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi</p>



						<p>4. Kerjasama informasi dengan mass media</p> <p>5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p>	<p>Penyebarluasan informasi pembangunan daerah</p> <p>Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur</p> <p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Pos dan Telematika.

Adanya Renstra ini diharapkan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil

Denpasar, Juli 2014

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Denpasar**

I Dewa Made Agung, SE., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19660525 199303 1 010



